

PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Rusdan

Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Indonesia

Email: rusdan1983@gmail.com

ABSTRACT

"Pesantren" is one of the crucial pillars of the state. Considering its existence, this institution has played a significant role in nation-building long before Indonesia gained independence. Its inception was laid in 1399 by Sheikh Maulana Malik Ibrahim, also known as Sunan Gresik. In subsequent periods, pesantren has continued to undergo improvements and strengthening, including enhancing economic self-reliance. The main issue examined in this research pertains to the economic self-reliance of pesantren, with three derivative issues: firstly, how urgent is the strengthening of pesantren's economic self-reliance; secondly, what are the obstacles and opportunities for strengthening pesantren's economic self-reliance; and thirdly, what strategic steps must pesantren take to reinforce its economic self-reliance. This research falls under qualitative research with an emphasis on literature study. All data used in this research are secondary data, which are of the second-hand type, including books, scholarly articles, newspapers, and the like. From a series of studies conducted, it can be concluded that pesantren needs to strengthen its economic self-reliance. This is primarily to ensure its independence and the flexibility to carry out various activities. The obstacles faced by pesantren in strengthening their economic self-reliance stem from both internal and external factors. Internal factors are more influenced by motivation and needs, while external factors are more influenced by cultural factors and upbringing. The steps taken by pesantren to strengthen their economic self-reliance include assessing potential and resources, strategic planning, income diversification, entrepreneurship education, prudent financial management, strengthening partnerships and networks, marketing expansion and promotion, transparency, and controlled and measurable risk management.

Keywords: Pesantren, Economic Self-Reliance, Independence.

ABSTRAK

Pesantren adalah salah satu pilar penting negara. Ditilik dari eksistensinya, lembaga ini telah memainkan peran pentingnya dalam membangun bangsa dan negara jauh sebelum Indonesia merdeka. Embrionya diletakkan pertama kali pada tahun 1399 oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Pada periode selanjutnya, pesantren terus melakukan pembenahan dan penguatan, tak terkecuali penguatan sisi kemandirian ekonomi. Pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah menyangkut kemandirian ekonomi pesantren dengan tiga masalah turunan, yakni *pertama*, seberapa urgen penguatan kemandirian ekonomi pesantren, *kedua*, apa saja hambatan dan peluang penguatan kemandirian ekonomi pesantren, dan *ketiga*, langkah strategis apa saja yang mesti dilakukan pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonominya. Penelitian ini termasuk penelitian

kualitatif dengan penekanan pada studi literatur atau disebut juga *library research*. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni jenis data yang diperoleh dari tangan kedua, baik berupa buku, artikel ilmiah, surat kabar, dan sebagainya. Dari serangkaian penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pesantren perlu memperkuat kemandirian ekonominya. Ini terutama agar independensinya terjaga sekaligus agar leluasa menjalankan berbagai kegiatannya. Kendala yang dihadapi pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonominya, berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi dan kebutuhan. Sedangkan faktor eksternal lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dan pola asuh. Adapun langkah-langkah yang ditempuh pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonominya mulai dari penilaian potensi dan sumber daya, perancangan strategis, diversifikasi pendapatan, pendidikan kewirausahaan, pengelolaan keuangan yang bijaksana, penguatan kemitraan dan jaringan, ekspansi pemasaran dan promosi, transparansi, hingga manajemen risiko yang terkendali dan terukur.

Kata Kunci: Pesantren, Kemandirian Ekonomi, Independensi.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2045, sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia genap berumur satu abad. Satu abad hanyalah angka. Maju mundurnya suatu negara tidak dapat diukur secara pasti dari lintasan waktu yang sudah dilaluinya. Bagi Jepang misalnya, waktu satu abad lebih dari cukup untuk memperbaiki kondisi negaranya pasca bom atom meluluhlantakkan dua kota terpetingnya, Hiroshima dan Nagasaki. Namun bagi negara lain, satu abad bisa saja dipandang tidak cukup, bahkan untuk mengentaskan buta aksara di negaranya.

Lantas, bagaimana gambaran Indonesia pada 2045? Kementerian PPN/BAPPENAS pada Mei 2019 merilis *Background Study* Visi Indonesia 2045 dengan *tage line* Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Visi yang tertuang dalam dokumen resmi negara ini tidak hanya berisi gambaran ideal mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045, namun juga berisi peta jalan (*road map*) yang mampu dan perlu dicapai hingga tahun 2045 saat Indonesia berusia satu abad. Penyusunan Visi yang tertuang dalam *background study* ini sendiri melibatkan semua pemangku kebijakan, baik di lingkungan eksekutif, yudikatif, legislatif, dan termasuk juga pendidikan tinggi, generasi muda, serta berbagai lembaga profesi.

Visi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945, yakni kehendak untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai dan meneguhkan tujuan bernegara dan berbangsa itu, maka dirumuskanlah Visi Indonesia Tahun 2045 yang

memuat 4 pilar dengan mempertimbangkan berbagai kecenderungan besar dunia (*global megatrend*) hingga tahun 2045/2050. Empat pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045 tersebut meliputi 4 hal, yakni: (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; dan terakhir (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.¹

Pondok Pesantren (selanjutnya disebut pesantren)² adalah salah satu pilar penting negara. Ditilik dari eksistensinya, lembaga ini telah memainkan peran pentingnya dalam membangun bangsa dan negara jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1873 saja, Kantor Inspeksi Pendidikan Pribumi kala itu, melaporkan sekurangnya terdapat 20-25.000 pesantren dengan jumlah santri yang mencapai sekitar 300.000 orang.³ Angka ini sangat realistis, mengingat agama Islam sebagai bingkai besar pesantren, telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 Hijriah.⁴ Pesantren, dengan demikian lebih dari cukup untuk disebut sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak *indigenous* (pribumi).⁵ Oleh

¹ Selengkapnya silakan rujuk Tim Penyusun Visi Indonesia 2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Background Study Visi Indonesia 2045*, (Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS, 2019).

² Pesantren adalah istilah yang populer di Jawa. Di Minangkabau lembaga tradisional ini disebut surau, di Aceh disebut dayah dan di Lombok disebut pondok. Lihat Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: IAIT Press & Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1. Sementara secara legal formal, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menggunakan empat istilah baku untuk menyebut lembaga pendidikan tradisional ini, yakni pondok pesantren, dayah, surau, dan meunasah. *Term* pesantren menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti, “asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Akar kata pesantren berasal dari kata “santri”, yaitu istilah yang pada awalnya digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura. Kata “santri” mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat para santri menuntut ilmu. Dalam pemakaian bahasa modern, santri memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian yang lebih luas dan umum, santri mengacu pada seorang anggota bagian penduduk Jawa yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh, rajin shalat, pergi ke masjid pada hari Jum’at dan sebagainya. Sementara secara teoritis, terdapat empat teori tentang asal usul kata santri, yaitu adaptasi dari Bahasa Sanskerta, Jawa, Tamil, dan India. Selengkapnya bisa merujuk karya Ali Anwar, *Ibid.*, hlm. 23. Lihat dan bandingkan dengan Neliwati, *Pondok Pesantren Modern Sistem Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8-11.

³ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 99. Angka ini terbilang fantastis, mengingat 13 tahun sebelumnya, yakni tahun 1860-an, berdasarkan data yang dikutip Hamid, jumlah pesantren, terutama di Jawa diperkirakan hanya 300 buah. Lihat Abdulloh Hamid, *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren*, (Surabaya, IMTIYAZ, 2017), hlm. 124.

⁴ Diskusi lebih lanjut mengenai awal mula masuknya Islam ke Nusantara bisa merujuk Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara*, (Jakarta: Gema Insani, 2017); Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013); Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid Kesatu*, (Bandung: Surya Dinasti, 2018).

⁵ Imam Thokliah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 49; Laifa Annisa

karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren merupakan embrio atau cikal bakal dari jenis-jenis pendidikan yang berkembang di Indonesia hingga kini.⁶

Pada awal kemunculannya, pesantren tumbuh sebagai simbol perlawanan terhadap agama dan kepercayaan politeistik, khurafat, dan takhayul, dengan membawa misi tauhid. Kehadirannya selalu diawali dengan perang nilai antara nilai putih yang dibawa pesantren dan nilai hitam yang telah mengakar kuat di masyarakat, dan selalu diakhiri dengan kemenangan di pihak pesantren, meski sinkretisme pada realitasnya sulit dibasmi.⁷ Hingga memasuki era revolusi industri 5.0, lembaga *indigenous* ini berhasil menunjukkan survivalnya. Padahal di beberapa negara Muslim, lembaga sejenis lenyap begitu modernisasi pendidikan digaungkan.⁸

Bertahannya institusi pesantren saat berhadapan dengan lembaga pendidikan yang didesain lebih modern dan teratur telah menarik beberapa pengamat untuk mengkajinya. Azyumardi Azra mencatat bahwa ketahanan pesantren disebabkan oleh kultur Jawa yang involutif dan menekankan harmoni, sehingga mampu menyerap kebudayaan luar tanpa kehilangan identitasnya. Hasan Langgulung menyimpulkan bahwa ketahanan pesantren tidak bisa dilepaskan dari pribadi kyai yang menonjol dengan ilmu dan visi besarnya. Sumartono dkk. menduga karena melembaganya pesantren di dalam masyarakat. Sementara bagi Ma'shum, ketahanannya adalah akibat dampak positif dari kemampuannya melahirkan berbagai daya guna bagi masyarakat. Aya Sofia dkk. menduga ketahanannya disebabkan oleh jiwa dan semangat kewiraswastaan. Sementara Abdurrahman Wahid menyebut ketahanan pesantren disebabkan oleh pola kehidupannya yang unik sebagai sub kultur.

Di tempat lain, Geertz berpendapat bahwa bertahannya pesantren ditentukan oleh kemampuannya dalam mempertahankan identitasnya sebagai sistem pendidikan yang didominasi oleh kyai dan pada saat yang bersamaan berhasil memperjelas kedudukannya sebagai komplementer pendidikan nasional.⁹

Jadi, secara sosio-historis seperti telah disinggung, pesantren di Indonesia sanggup melewati berbagai rintangan dan hambatan. Namun bila ditilik dari sisi

Hendarmin dan Alvin Noor Sahab (Editor), *Pesantren & Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentanan*, (Jakarta: PPIM-UIN Jakarta, 2022), hlm. 1.

⁶ Lailial Muhtifah, Zaenuddin, dan Nurhamzah, *Model Pemberdayaan Mutu Pondok Pesantren Sebagai Pusat Studi Masyarakat* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015), hlm.7.

⁷ Imam Thokliah dan Ahmad Barizi, *Ibid.*, hlm. 50-51.

⁸ Fenomena punah atau minimal terpinggirkannya pesantren bisa dilihat di Turki atau di Mesir. Selengkapnya lihat Ali Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 2-4. Lihat juga Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat, 1997), hlm. 4-5.

⁹ Ali Anwar, *Ibid.*, hlm. 3.

kemandirian ekonominya, ternyata pesantren masih jauh dari kata mandiri. Untuk itu, setiap pesantren dituntut melakukan penguatan pada sisi ini. Penguatan kemandirian ekonomi ini sendiri penting dilakukan karena bagaimana pun juga, pesantren tidak boleh bergantung sepenuhnya pada iuran santri maupun bantuan pihak lainnya. Meski masih terbatas, saat ini pengembangan unit usaha pesantren telah terjadi secara sporadis di beberapa pesantren, terutama pesantren yang memiliki *endowment factor* cukup besar dalam bentuk aset dan jumlah santri lulusan. Menurut data Kementerian Agama, pada tahun 2004 terdapat 1,529 pesantren yang mengembangkan usaha di bidang agribisnis, 404 pesantren di bidang perindustrian, 111 pesantren di bidang perdagangan, dan sisanya 41 pesantren mengembangkan bidang ekonomi kelautan dan perikanan. Jika ditotal, jumlah tersebut hanya sekitar 0.96% dari total 21,521 pesantren yang ada di Indonesia kala itu. Sementara pada tahun 2019, Kementerian Agama mempublikasikan data potensi ekonomi pesantren di Indonesia yang menunjukkan bahwa terdapat 9008 pesantren yang berpotensi mendirikan unit usaha. Jumlah tersebut sekitar 32% dari total 27,722 pesantren di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan narasi ringkas di atas, artikel ini hendak mendiskusikan masalah utama yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi pesantren. Adapun masalah turunan dari masalah utama tersebut mencakup pertanyaan seberapa urgen penguatan kemandirian ekonomi pesantren, apa saja hambatan dan peluang penguatan kemandirian ekonomi pesantren, dan terakhir langkah strategis apa saja yang mesti dilakukan pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonominya. Namun di samping permasalahan tersebut, artikel ini juga akan membahas dua masalah mendasar lainnya, yakni akar genealogi pesantren serta tantangan dan peluang dunia pesantren menghadapi tahun emas Indonesia pada 2045.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang kerap dikontraskan dengan penelitian kuantitatif. Bila jenis penelitian pertama mengandalkan interpretasi Peneliti terhadap suatu fenomena atau informasi non numerik, maka penelitian jenis kedua menitikberatkan pada interpretasi dalam bentuk hasil penghitungan matematis atau numerik. Sementara itu, pendekatan

¹⁰ Maya Silvana dan Deni Lubis, "Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren al-Ittifaq Bandung)", dalam *Al-Muzara'ah*, Vol. 9, Nomor 2, 2021, hlm. 130-131.

penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau kerap juga disebut *library research*. Dalam konteks ini, berbagai literatur yang berhasil dikumpulkan mengenai penguatan kemandirian ekonomi pesantren diolah sedemikian rupa sehingga berbentuk artikel ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni jenis data yang diperoleh dari tangan kedua, baik berupa buku, artikel ilmiah, surat kabar, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Akar Genealogi Pesantren

Pesantren di Indonesia telah melewati waktu yang sangat panjang dan berliku. Sejauh dapat dilacak, embrionya telah terbentuk sejak tahun 1630.¹¹ Bahkan merujuk pada hasil penelitian Ronald Alan Lokens Bull, pesantren pertama kali dirintis pada tahun 1399¹² oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim.¹³ Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan nama Sunan Gresik adalah seorang ulama' kelahiran Samarkand. Ayahnya, Maulana Jumadil Kubro merupakan keturunan kesepuluh dari Husein bin Ali. Ia adalah ulama' yang berasal dari Gujarat India. Oleh karenanya, pesantren yang didirikannya ditengarai mirip dengan biara perguruan Hindu-Budha India.¹⁴

Dalam periode yang tidak terlalu jauh setelahnya, Raden Rahmat (Sunan Ampel) menjadi tokoh penting yang berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren. Pertama kali ia mendirikan pesantren di daerah Kembang Kuning dengan tiga orang santri, yakni Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, dan Kiai Bangkuning. Setelah itu pindah ke Ampel Denta dan mendirikan pesantren kedua sehingga Raden Rahmat kemudian dikenal dengan Sunan Ampel. Selanjutnya bermunculan beberapa pesantren baru, baik yang didirikan oleh para santri maupun anaknya, seperti Pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pesantren Demak oleh Sunan Raden Patah, dan Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.¹⁵

¹¹ Ahmad Muthohar, *Ideologi Pendidikan Pesantren; Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 3.

¹² Bandingkan data ini dengan data yang dikemukakan Amit Saepul Malik yang menyebutkan bahwa Syaikh Maulana Malik Ibrahim justru baru tiba atau singgah di Desa Leran Gresik pada tahun 1404 setelah sebelumnya tinggal di Champa selama kurang lebih 13 tahun. Uraian selengkapnya periksa Amit Saepul Malik, *Kiprah Intelektual Pesantren*, (Purwakarta: Taqaddum Press, 2022), hlm. 22.

¹³ Abd. Halim Soebahar dalam kata pengantar Mustajab, *Masa Depan Pesantren Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. vii.

¹⁴ Amit Saepul Malik, *Loc. Cit.*

¹⁵ Abd. Halim Soebahar dalam kata pengantar Mustajab, *Op. Cit.*, hlm. viii; Amit Saepul Malik, *Ibid.*, hlm. 23.

Penting dicatat bahwa meski tidak dapat dipastikan awal mula kemunculan pesantren di Indonesia. Namun setidaknya pada awal abad ke-16 rekam jejak pesantren telah dimuat dalam dua karya penting sastra Jawa klasik, yakni *Serat Cebolek* dan *Serat Centini*. Kedua *serat* dimaksud telah menyebut sejumlah pesantren terkenal kala itu yang menjadi pusat-pusat pendidikan Islam.¹⁶ Disebutkannya pesantren dalam dua *serat* tersebut mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan tradisional Islam tersebut telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana dengan awal mula kemunculannya yang tidak dapat dipastikan, sistem pembelajaran pesantren kala itu juga tidak dapat dipastikan. Namun Neliwati menyimpulkan bahwa bentuk paling awal pesantren difokuskan hanya untuk mengkaji al-Qur'an. Dalam pengajian ini, murid belajar huruf-huruf Arab dan menghafal ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Di samping itu, diajarkan pula aturan-aturan dan tata cara salat, wudhu dan doa-doa. Lembaga awal pengajian ini dilakukan secara individual di rumah guru, masjid, langgar, surau atau juga di rumah-rumah orang tua murid yang memiliki kedudukan penting.¹⁷

Setelah murid menyelesaikan pendidikan yang bercorak individual (pengajian al-Qur'an), baru kemudian dilanjutkan lagi dengan pendidikan lanjutan berupa pengajian kitab. Pengajian kitab ini berbeda dengan pengajian al-Qur'an yang bercorak individual. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tiga segi. *Pertama*, pada umumnya, para murid pengajian kitab masuk asrama dalam lingkungan lembaga pendidikan agama Islam yang disebut pesantren. *Kedua*, mata pelajaran yang diberikan meliputi mata pelajaran yang lebih banyak daripada pengajian al-Qur'an. Fase pertama pendidikannya umumnya dimulai dengan pendidikan bahasa. *Ketiga*, pendidikan diberikan tidak hanya secara individual, tetapi juga secara berkelompok.¹⁸

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, pesantren pernah mendapatkan angin segar meski pada akhirnya dianginlalu. Ini tercermin dari Instruksi Gubernur Jenderal G.A.G.Ph. van der Capellen (1816-1826) kepada para residen pada tahun 1819 untuk menyelidiki berbagai kemungkinan untuk memperbaiki pendidikan tradisional kaum pribumi. Namun sayangnya, upaya ini hanya sekedar menghasilkan laporan-laporan resmi mengenai kondisi pesantren.¹⁹ Berdasarkan laporan resmi tersebut

¹⁶ Jajat Burhanudin, dkk, *Civic Values di Indonesia; Pengalaman Pemberdayaan Pesantren*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2009), hlm. 56; Imam Thoklhah dan Ahmad Barizi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹⁷ Neliwati, *Op. Cit.*, hlm. 6-7. Lihat dan bandingkan Abdulloh Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 46

¹⁸ Neliwati, *Ibid.*

¹⁹ Yudi Latif, *Op. Cit.*, hlm. 97.

diketahui bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional telah meuncul secara sporadik di beberapa kabupaten yang terletak di daerah pesisir seperti Cirebon, Semarang, Kendal, Demak, Jepara, Surabaya, Gresik, Bawean, Sumenep, Pamekasan, dan Besuki.²⁰

Sementara di masa revolusi kemerdekaan, pesantren juga berperan untuk menggalang kekuatan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 menjadi bukti kontribusi nyata kaum santri dalam merebut kemerdekaan.

Selain itu, sejarah pesantren tidak bisa dilepaskan dari terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejarah mencatat bahwa Laskar Hizbullah di bawah pimpinan KH Zainul Arifin serta Laskar Sabilillah di bawah barisan KH Masjkur merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk itu, wajar jika banyak tokoh dari kalangan santri yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Bukti-bukti sejarah tersebut kemudian menjadi dasar Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri.²¹

Memasuki tahun 2000-an dunia pesantren kembali diuji. Lembaga pendidikan tradisional ini memperoleh stigma negatif sebagai sarang teroris dan kelompok radikal. Ini karena beberapa aksi terorisme dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pesantren. Pelaku Bom Bali tahun 2002, Amrozi cs, berasal dari Pesantren al-Islam Tenggulun, Lamongan; 2 tersangka teroris Solo yang ditembak mati tahun 2012, Farhan Mujahid dan Muchsin Tsani adalah alumni Pesantren Ngruki, Solo; dan Aman Abdurrahman, pimpinan Jamaah Ansharud Daulah (JAD), pernah nyantri di Pesantren Darussalam Ciamis. Namun penting digarisbawahi bahwa mereka yang disebut namanya di atas tidak mewakili keseluruhan profil pesantren karena sebagian besar pesantren tidak terpapar radikalisme keagamaan. Dari total jumlah pesantren yang mencapai 28 ribuan pada 2016, yang terindikasi radikal oleh BNPT dapat dihitung dengan jari. Sebagian besar pesantren masih berkarakter moderat, toleran dan mendukung demokrasi dan NKRI.²²

Namun penilaian buruk BNPT mengenai sejumlah pesantren yang diindikasikan radikal bertumpu pada dua konsep kunci yang sangat problematik,

²⁰ Neliwati, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²¹ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/pesantren--dulu--kini--dan-mendatang>, diakses 9 September 2023.

²² Irfan Abubakar & Idris Hemay (Editor), *Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme (Social Bonding, Social Bridging, Social Linking)*, (Jakarta: CSRC UIN, 2020), hlm. 1.

yakni “pesantren” dan “radikal”. *Pertama*, apakah lembaga-lembaga tersebut layak disebut pesantren menurut keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren. *Kedua*, jika lembaga itu memang benar sebuah pesantren, kriteria apa yang digunakan sehingga pesantren itu dikategorikan radikal. Apakah karena alasan pengajar atau dosen atau santri terlibat dalam gerakan radikal, dikatakan pesantren radikal secara kelembagaan.²³

Lepas dari dicurigainya segelintir pesantren sebagai sarang teroris dan kelompok radikal, pada 2019 dunia pesantren memasuki babak baru seiring disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Sebagaimana tertera pada bagian menimbang, undang-undang tersebut merupakan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi yang diberikan pemerintah pada pesantren.²⁴ Kecuali itu, undang-undang tentang pesantren itu diharapkan dapat memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada aspek-aspek seperti pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas berbagai kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, rekognisi atas pemenuhan unsur pesantren (*arkanul ma’had*) dan ruh pesantren (*ruhul ma’had*) sebagai syarat pendirian, dan termasuk juga rekognisi kepada pendidikan pesantren sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pesantren tidak hanya berkuat pada fungsi pendidikan. Lembaga ini juga diamanahi fungsi lainnya, yakni fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.²⁵ Dengan begitu, secara fungsional-institusional pesantren sebetulnya merupakan sistem yang multidimensional. Ia berfungsi sebagai institusi pendidikan, dakwah, sosial, dan budaya.²⁶

Sebagai peraturan turunan dari undang-undang tersebut, lahir 3 Peraturan Menteri Agama (PMA), yakni: Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren; Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren; dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 32 Tahun 2020 Tentang Ma’had Aly. Sebagai upaya menciptakan atmosfer

²³ Khaeron Sirin (Eds.), *Transformasi Pesantren Salafi*, (Jakarta Pusat: Litbangdiklat Press, 2021), hlm. 5-7.

²⁴ Lihat substansi bagian menimbang huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

²⁵ Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

²⁶ Erma Fatmawati, *Profil Pesantren Mahasiswa*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. xii

pendidikan yang berkeadilan, undang-undang pesantren itu nantinya menjadi landasan hukum yang kuat bagi terbentuknya instrumen pembiayaan untuk memastikan ketercukupan dan ketersediaan anggaran dalam pengembangan pesantren.²⁷

Pada akhir tahun 2019, beberapa bulan setelah undang-undang pesantren disahkan, dunia dikejutkan dengan adanya virus yang muncul di Wuhan, Tiongkok. Badan kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada 31 Desember 2019 mengumumkan wabah virus dengan sebutan Covid-19 sebagai darurat kesehatan publik internasional dan kepedulian internasional (PHEIC/*Public Health Emergency of International Concern*).²⁸ Sektor pendidikan secara umum dan pesantren secara khusus menjadi salah satu lembaga yang paling terdampak pandemi Covid-19. Siswa di berbagai belahan dunia dituntut melaksanakan pembelajaran *online*. Kala itu, di seluruh dunia terdapat sedikitnya 127 juta sekolah yang terdampak Covid-19. Di Indonesia sendiri, dilaporkan terdapat 407.000 sekolah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan jumlah kurang lebih 68 juta siswa terpaksa belajar dari rumah.²⁹

Kegiatan pembelajaran di pesantren pada awal pandemi berjalan dengan baik, dan tenang tanpa adanya santri yang terpapar Covid-19. Namun, tiba-tiba ada santri yang mengalami sakit dan setelah di swab ternyata positif Covid-19. Santri ini bisa saja tertular saat di rumah. Paska memasuki pesantren dinyatakan negatif, tetapi belum terdeksi. Tidak hanya itu, kesiapan pesantren dalam kelembagaan maupun individu untuk menghadapi Covid-19 baik secara pengetahuan, sikap, persepsi, dan perilaku kesehatan masih rendah. Hal inilah yang menyebabkan salah satu munculnya klaster baru di pesantren.

Menurut KH. Amin Ma'ruf selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenag, ada sekitar 605 kiai dan nyai yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.³⁰

Meski pada 2019-an dunia berjibaku dengan Covid-19, dunia pesantren menunjukkan resiliensinya. Jumlah pesantren dan santri sebelum dan setelah pandemi cukup stabil. Hingga Juli 2023 Kementerian Agama RI mencatat setidaknya

²⁷ Khaeron Sirin (Eds.), *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁸ Laifa Annisa Hendarmin dan Alvin Noor Sahab (Editor), *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁹ Laifa Annisa Hendarmin dan Alvin Noor Sahab (Editor), *Ibid.*, hlm. 4.

³⁰ Laifa Annisa Hendarmin dan Alvin Noor Sahab (Editor), *Ibid.*, hlm. 5.

terdapat 39.043 pesantren dengan 4,08 juta santri. Dari jumlah ini, pesantren paling banyak berada di Jawa Barat yang mencapai 12.121 pesantren. Posisi kedua ditempati Jawa Timur dengan 6.744 pesantren, sebanyak 6.430 pesantren berlokasi di Banten. Sementara di Jawa Tengah dan Aceh masing-masing terdapat 5.084 dan 1.713 pesantren.³¹

Uraian ringkas di atas menegaskan bahwa pesantren ternyata memiliki akar *socio-historis* yang sangat kuat, sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakat, dan sekaligus bertahan ditengah-tengah berbagai gelombang perubahan yang tidak jarang di luar nalar.³²

Pesantren di Indonesia telah melewati waktu yang sangat panjang dan berliku sebagaimana diuraikan di atas. Ibarat pepatah, ia telah banyak makan asam garam kehidupan. Secara historis, lembaga ini telah bersinggungan dengan kerajaan Hindu-Budha, VOC, pemerintahan kolonial Belanda, masa pergerakan, kemerdekaan hingga era post reformasi ini. Fakta ini lebih dari cukup sebagai dasar meramal masa depan pesantren. Jika pesantren di masa lalu dapat melewati fase yang paling suram sekalipun, maka tentu akan sangat mudah sekali melewati masa depan yang lebih baik. Secara teoritis-praktis ini tidaklah berlebihan. Karena memang secara makro kehidupan manusia dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan abad ke abad ternyata semakin membaik, alih-alih semakin memburuk, baik itu menyangkut pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik dan sebagainya.³³

Tantangan dan Peluang Dunia Pesantren 2045

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional di Indonesia yang telah berkontribusi secara signifikan dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Namun, dalam menghadapi perkembangan zaman dan berbagai dinamika sosial, pesantren menghadapi sejumlah tantangan yang tidak sederhana.

Tantangan-tantangan yang dihadapi pesantren ke depan lebih banyak berhubungan dengan aspek modernisasi dan teknologi; kurikulum dan pembelajaran

³¹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/selain-al-zaytun-berapa-jumlah-pesantren-di-indonesia>, diakses 9 September 2023.

³² Masnur Alam, *Model Pesantren sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2010), hlm. 3-4.

³³ Uraian lengkap tentang evolusi kemakmuran dan kemapanan dalam sejarah umat manusia bisa merujuk Matt Ridley, *Optimis Rasional*, Terj. Zia Anshor, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.)

yang berimbang; dan kehadiran media sosial dan informasi.³⁴ Di samping ketiga persoalan itu, masalah visi dan misi pesantren masih menjadi tantangan tersendiri. Kebanyakan pesantren tidak memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur yang disesuaikan dengan berbagai perubahan yang akan dihadapi sepuluh dua puluh bahkan ratusan tahun ke depan.

Seperti dimaklumi, saat ini perubahan besar berjalan teramat cepat dan melanda kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang mana hal ini memaksa pesantren mempersiapkan diri untuk berubah agar bisa *survive* dalam menghadapi berbagai bentuk persaingan pendidikan Islam di era global, yang tidak hanya menuntut kerja keras namun juga hasil kerja yang berkualitas tinggi. Untuk mengadakan berbagai perubahan di pesantren, yang perlu diutamakan adalah visi dan misi pesantren itu sendiri. Visi misi harus ditekankan kembali agar pesantren tidak kehilangan arah dan tujuan awal pesantren itu didirikan.

Banyak ahli yang menyimpulkan bahwa faktor pertama dan utama yang menyebabkan kurangnya kemampuan pesantren mengikuti dan menguasai perkembangan zaman terletak pada lemahnya visi dan misi pesantren. Ironisnya, tidak banyak pesantren yang sanggup menuangkan visi dan misinya ke dalam tahapan-tahapan rencana kerja yang terukur. Fakta ini menurut Nurcholish Madjid lebih banyak disebabkan oleh adanya kecenderungan penyusunan visi dan tujuan pesantren yang diserahkan sepenuhnya pada improvisasi yang dipilih sendiri oleh kiai atau dalam batas-batas tertentu bersama-sama para pembantunya. Di sinilah sebetulnya diuji kapasitas *leadership* yang dimiliki kiai dalam merumuskan visi, misi, termasuk juga tujuan pondok pesantren, terlebih lagi saat dihadapkan pada era globalisasi ini. Untuk merancang visi dan misi pesantren perlu memenuhi minimal dua persyaratan, yaitu: *pertama*, sejalan dengan kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat (*stakeholder*) dan *kedua*, mampu mengakomodir perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.³⁵

Visi dan misi pesantren perlu dirancang dengan memperhatikan dua syarat minimal tersebut karena visi dan misi itu sendiri memiliki keterkaitan yang sangat

³⁴ Malik menginventarisir sejumlah tantang yang dihadapi pesantren dewasa ini, mencakup masalah dasar filosofis, gagasan, visi, misi, institusi, program, manajemen, sumber daya manusia bidang kependidikan, lingkungan pendidikan, pembiayaan, kepercayaan dan partisipasi masyarakat, kualitas outpun pendidikan, serta relevansinya dengan dinamika masyarakat dan tuntutan sosio-kultural sekitarnya. Lihat Amit Saepul Malik, *Op. Cit.*, hlm. 16.

³⁵ Mustajab, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

erat dengan berbagai elemen yang ada, mulai dari program pendidikan yang diselenggarakan, kurikulum yang digunakan, pola kepemimpinan, pengaruh ideologi dan paham keagamaan serta jaringan yang terbangun dengan dunia luar, hingga peran pesantren yang semakin luas (*wider mandate*).³⁶

Tantangan lain yang dihadapi dunia pesantren ke depan adalah hal-hal yang berkenaan dengan modernisasi dan teknologi.

Pada dasarnya modernisme bukanlah kesatuan yang utuh, statis dan tidak bisa dipertemukan dengan budaya, tradisi serta nilai-nilai etis lain yang selama ini dianggap kontraproduktif.³⁷ Dalam ranah ini, modernisasi pesantren mengarah pada upaya dinamis mendialogkan nilai-nilai kultural pesantren yang berciri khas dan unik dengan budaya dan praktik modernitas secara etis, sehingga pada gilirannya menghasilkan perpaduan entitas nilai-nilai lama dengan nilai baru yang lebih sempurna.³⁸ Memodernisasi sistem pendidikan pesantren sendiri di antaranya meliputi, tetapi tidak dapat dibatasi pada modernisasi kelembagaan, kurikulum, metode pengajaran pendidikan pesantren dan juga modernisasi pada fasilitas (sarana dan prasarana) yang dimiliki pesantren.³⁹

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin masif akhir-akhir ini semestinya juga merubah pola pembelajaran di pesantren yang semula menggunakan peralatan sederhana, harus dirubah ke arah pembelajaran *melek* teknologi. Pembelajaran secara digital harus dibangun sehingga berbagai kemajuan teknologi, semisal pembelajaran berbasis *platform online* dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. Namun pemanfaatan teknologi informasi ini harus dilakukan dengan tanpa meninggalkan karakteristik luhur pesantren. Oleh karenanya, dibutuhkan standarisasi yang ideal, baik pada tataran regulasi, reformasi dan akreditasi pesantren. Standarisasi digital diperlukan agar sistem pendidikan Islam benar-benar mendapatkan lulusan yang kognitif, baik di tataran nasional maupun internasional.⁴⁰

³⁶ Khaeron Sirin (Eds.), *Op. Cit.*, hlm. 2.

³⁷ Abul Hasan Al Asyari, "Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren di Era Modern," dalam *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, Volume 2, Number 1, Januari 2022, hlm. 137.

³⁸ Abul Hasan Al Asyari, *Loc. Cit.*

³⁹ Dede Jamalul Aziz, "Modernisasi dan Transformasi Pondok Pesantren," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 2, November 2019, hlm. 281.

⁴⁰ Munifah, "Antara Tradisi dan Modernitas: Metamorfosis Pesantren di Era Digital," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 2, November 2019, hlm. 2-3.

Jika pesantren gagal mengakomodir fenomena modernisasi dan berbagai perkembangan teknologi ini, maka hampir dapat dipastikan dunia pesantren akan menjadi terasing, perannya akan berkurang, lulusannya pun akan menjadi orang asing di zamannya, bahkan eksistensinya pun lambat laun akan terancam.⁴¹

Namun perlu diperhatikan bahwa teknologi ibarat pisau bermata dua. Baik buruknya sangat bergantung pada pengguna dan penggunaannya. Berbagai teknologi yang berkembang pesat, termasuk juga berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Threads*, dan *platform* lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan santri dan pesantren di Indonesia. Karenanya pesantren harus memiliki kebijakan yang cerdas menyangkut teknologi dan media sosial tersebut.

Tantangan lain yang masih akan menghadang dunia pesantren adalah seting kurikulum dan pembelajaran yang berimbang antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Sejauh ini, pesantren yang paling modern sekalipun belum sanggup menyeimbangkan kedua rumpun ilmu ini. Pesantren masih dipandang sebagai lembaga pencetak ulama', alih-alih ilmuwan yang ulama' atau ulama' yang ilmuwan. Ini sebetulnya tidak salah. Karena bagaimana pun juga, awal kemunculannya diprioritaskan untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman bagi warga pribumi sekaligus sebagai *counter* terhadap lembaga pendidikan sekuler-protestan bentukan kolonial. Hanya saja perkembangan teknologi dan informasi yang menyasar semua lini kehidupan akhir-akhir ini menuntut lebih. Ilmu umum sama pentingnya dengan ilmu agama.

Menyeimbangkan kurikulum dan pembelajaran antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum sebetulnya bukan hal yang asing bagi pesantren. Dalam porsi yang berbeda-beda, pesantren sudah lama melakukan modernisasi dan transformasi kurikulum. Ini tampak dari keberadaan lembaga pendidikan formal di lingkungan pesantren, baik yang kurikulumnya *mix* seperti MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi keagamaan maupun yang murni umum seperti SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi umum. Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana melakukan integrasi-interkoneksi⁴² antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu

⁴¹ Anis Humaidi, "Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 2, November 2019, hlm. 257.

⁴² Istilah ini dipinjam dari M. Amin Abdullah secara khusus dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara umum dalam makna yang kurang lebih sama. Seputar tema ini, ada beberapa karya yang dapat dirujuk, di antaranya Maragustam (Ed.), *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

keislaman. Lebih luas mengenai ini akan didiskusikan pada sub bahasan mengenai pesantren dan Indonesia emas 2045.

Tantangan terakhir yang mesti diperhatikan dunia pesantren adalah kehadiran media sosial dan informasi yang semakin menggila. Saat ini informasi yang beredar di dunia maya lebih banyak berupa data sampah. Untuk itu, diperlukan kecakapan khusus untuk memilih dan memilah berbagai informasi tersebut.

Sementara itu, sebagaimana telah disinggung di atas bahwa teknologi, termasuk di dalamnya berbagai media sosial dan informasi ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menimbulkan pengaruh positif sekaligus negatif. Di antara pengaruh positifnya adalah menyangkut akses informasi dan pendidikan; pembelajaran *online*; promosi pesantren; serta komunikasi dan jaringan.

Teknologi memungkinkan santri untuk mengakses berbagai sumber informasi dan pendidikan secara *online*. Mereka dapat mengakses kitab-kitab digital, rekaman ceramah, dan bahan pelajaran lainnya yang dapat melengkapi pendidikan mereka di pesantren.

Sementara platform pembelajaran *online* memungkinkan pesantren untuk melengkapi metode pengajaran tradisional dengan materi-materi tambahan yang dapat diakses oleh santri secara fleksibel.

Di sisi lain media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan pesantren kepada calon santri dan masyarakat umum, meningkatkan visibilitas dan daya tarik pesantren.

Adapun berbagai perkembangan teknologi memungkinkan santri untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan sepesantren, bahkan jika mereka berada jauh dari rumah.

Di samping pengaruh positif, terdapat juga pengaruh negatif di antaranya gangguan terhadap konsentrasi dan ibadah; isu keamanan data; potensi konten negatif; dan pembentukan identitas digital yang negatif.

Penggunaan berlebihan media sosial dapat mengganggu konsentrasi santri dalam belajar dan ibadah, mengganggu lingkungan pesantren yang biasanya cenderung tenang dan kontemplatif. Sejauh ini pesantren dapat meminimalisir pengaruh buruk ini. Ini karena lingkungan pesantren yang eksklusif dan dalam batas tertentu dapat dikontrol. Ke depan tantangan ini semakin berat dan dinamis.

Penggunaan teknologi juga membawa risiko keamanan data pribadi, dan informasi sensitif santri dan pesantren dapat terancam. Di pihak lain, media sosial juga dapat menjadi wadah bagi konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang diajarkan di pesantren. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat membentuk identitas digital yang buruk bagi santri, yang dapat berdampak pada reputasi pribadi dan pesantren.

Sementara itu, ke depan pesantren harus melakukan beberapa penguatan guna menjaga eksistensinya dalam gejolak dunia pendidikan. Penguatan yang dimaksud terutama menyangkut integrasi-interkoneksi pendidikan agama dan umum, pemanfaatan teknologi pendidikan, dan mempertahankan nilai-nilai utama pesantren.

Penguatan *pertama* yang harus dilakukan pesantren adalah menyangkut integrasi-interkoneksi pendidikan agama dan umum. Konsep integrasi-interkoneksi yang digagas Amin Abdullah berangkat dari kegelisahan akademik atas fenomena dikotomis-atomistik yang terjadi dalam tradisi keilmuan Islam selama ini. Tradisi berpikir dikotomis-atomistik ternyata tidak hanya melibatkan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman dan humaniora yang biasa disebut ilmu-ilmu umum (sekuler) berhadapan dengan ilmu-ilmu keislaman, namun juga melibatkan paradigma sesama kluster disiplin keilmuan Islam dengan cara memisahkan bahkan mempertentangkan antara paradigma epistemologi bayani, irfani, dan burhani.⁴³ Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali mengintegrasikan-koneksikan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu keislaman. Di antara tempat persemian terbaik (mungkin juga ideal) konsep integrasi-interkoneksi keilmuan ini adalah pesantren.

Pola berpikir yang serba dikotomis-atomistik yang berkembang selama ini telah menjadikan manusia terasing dari nilai-nilai spritualitas-moralitas, terasing dari dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat, lingkungan sekitar, serta dari denyut nadi lingkungan sosial budaya. Kondisi ini menandakan telah terjadinya proses dehumanisasi secara masif, baik pada tataran kehidupan keimuan maupun keagamaan. Selain itu, pandangan dikotomis-atomistik keilmuan ini merupakan kecelakaan sejarah dan tidak sesuai dengan pandangan integralistik ilmu pengetahuan pada masa-masa awal Islam.⁴⁴

⁴³ Aksin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistemologi*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 293.

⁴⁴ Aksin Wijaya, *Ibid.*, hlm. 295.

Pesantren telah lama menjadi lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam melestarikan ajaran Islam di Indonesia. Namun, untuk menjaga relevansinya dalam era modern yang semakin terkoneksi melalui teknologi, pesantren perlu mengadopsi konsep integrasi-interkoneksi, yang diperkenalkan oleh Amin Abdullah, untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan.

Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, pesantren telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep ini, dikenal sebagai integrasi-interkoneksi, mencerminkan komitmen pesantren untuk mempersiapkan santri tidak hanya dalam bidang agama Islam tetapi juga dalam ilmu-ilmu umum yang relevan.

Integrasi-interkoneksi dalam pesantren membantu mempersiapkan santri menjadi individu yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini juga mendukung visi pendidikan Islam yang tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pesantren yang menerapkan konsep integrasi-interkoneksi berperan penting dalam menjembatani pemahaman Islam dan ilmu pengetahuan modern dalam konteks pendidikan. Ini adalah langkah positif menuju mempersiapkan generasi yang komprehensif dan relevan dalam dunia yang semakin terhubung dan maju secara teknologi.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari integrasi-interkoneksi dalam dunia pesantren: *Pertama*, pendekatan terpadu dalam kurikulum. Pesantren modern telah mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran agama Islam dengan ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Pendekatan ini membantu santri melihat hubungan antara ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. *Kedua*, penggunaan teknologi pendidikan. Pesantren juga memanfaatkan teknologi pendidikan seperti komputer dan internet untuk memperkaya pembelajaran. Santri dapat mengakses sumber daya pendidikan global dan memahami bagaimana teknologi dapat mendukung pemahaman agama. *Ketiga*, pembelajaran kontekstual. Integrasi-interkoneksi memungkinkan pesantren untuk memberikan pembelajaran kontekstual. Santri belajar bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai disiplin ilmu. *Keempat*, pengembangan kemampuan analisis kritis. Santri diajarkan untuk

menggabungkan pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam menilai permasalahan kompleks. Mereka mengembangkan kemampuan analisis kritis yang berguna dalam memecahkan masalah sosial dan etis. *Kelima*, kolaborasi dengan institusi pendidikan umum. Beberapa pesantren menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan umum seperti sekolah negeri atau perguruan tinggi. Ini memungkinkan santri untuk mengakses pendidikan formal di berbagai bidang.

Penguatan *kedua* adalah berkenaan dengan pemanfaatan teknologi pendidikan. Umumnya dipahami bahwa teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan dan penilaian sistem, teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik.⁴⁵ Dari sini dapat dipahami bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu terapan yang berusaha mencari dan menemukan bagaimana memecahkan masalah-masalah yang terjadi selama kegiatan instruksional di kelas berlangsung dan mencari solusinya. Dengan begitu, teknologi pendidikan lebih banyak berurusan dengan upaya mencari terobosan-terobosan baru dan memfasilitasi bagaimana suatu kegiatan instruksional tadi dapat berlangsung dengan baik. Pemanfaatan teknologi pendidikan dalam kegiatan instruksional memberikan pengaruh yang cukup berarti dengan adanya perubahan dalam pendidikan, seperti model instruksional, metode instruksional, strategi instruksional dan media instruksional yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.⁴⁶

Belakangan istilah teknologi pendidikan atau dalam bahasa Inggris disebut *educational technology* (biasa disingkat *edutech* atau *edtech*) mengacu pada gabungan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan teori dan praktik pendidikan untuk memfasilitasi keseluruhan proses pembelajaran. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah *edtech* sebagai akronim teknis dari *educational technology* seringkali mengarah pada industri perusahaan yang menciptakan teknologi pendidikan.

Selain pengalaman pendidikan praktis, teknologi pendidikan didasarkan pada pengetahuan teoritis dari berbagai disiplin ilmu seperti komunikasi, pendidikan, psikologi, sosiologi, kecerdasan buatan, dan ilmu komputer. Ini mencakup beberapa

⁴⁵ Muhammad Japar, *Teknologi dan Informasi Pendidikan*, (Jakarta Timur, Laboratorium Sosial Politik Press, 2018), hlm. 75.

⁴⁶ Asnah Said, *Profil Guru Masa Depan Berbasis Teknologi Pendidikan*, (Banten: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 18-19.

domain termasuk teori pembelajaran, pelatihan berbasis komputer, pembelajaran *online*, dan *m-learning*, di mana teknologi seluler digunakan.⁴⁷

Penggunaan teknologi pendidikan di pesantren merupakan langkah penting dalam menjaga relevansi pesantren dalam era modern. Integrasi teknologi membantu pesantren untuk tetap memberikan pendidikan agama yang kuat sambil mengikuti perkembangan zaman. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, upaya ini memiliki potensi untuk memperkuat peran pesantren dalam pendidikan dan pengembangan santri.

Pemanfaatan teknologi pendidikan di pesantren tampak pada beberapa kegiatan berikut ini:

1. *Pendigitalan Materi Pembelajaran.* Pesantren saat ini berupaya mengadopsi teknologi dengan mengonversi buku-buku agama, tafsir, dan kitab-kitab lainnya menjadi format digital. Ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat untuk santri.
2. *Pembelajaran Jarak Jauh.* Seiring dengan perkembangan teknologi, pesantren telah memanfaatkan platform pembelajaran daring untuk memberikan kuliah dan kajian agama. Ini memungkinkan santri untuk mengikuti pembelajaran dari jarak jauh, yang sangat berguna dalam situasi pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu.
3. *Aplikasi Mobile.* Beberapa pesantren telah mengembangkan aplikasi mobile khusus yang berisi bahan-bahan pembelajaran, informasi jadwal, dan notifikasi penting lainnya, memudahkan santri dalam mengakses informasi penting.
4. *Multimedia dalam Pembelajaran.* Penggunaan multimedia seperti video, presentasi, dan audio telah menjadi bagian integral dalam pengajaran agama di pesantren. Ini membantu visualisasi konsep-konsep agama dengan lebih baik.

Meskipun ada manfaat yang jelas dari penggunaan teknologi pendidikan di pesantren seperti diuraikan di atas, akan tetapi terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi. Beberapa pesantren mungkin menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, sumber daya, atau keahlian teknis. Namun, dengan upaya yang tepat, penggunaan teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren, meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan, dan membantu pesantren menjaga relevansinya dalam dunia pendidikan modern.

⁴⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_pendidikan, diakses 11 September 2023.

Penguatan ketiga yang mesti diperhatikan pesantren adalah mempertahankan nilai-nilai tradisional pesantren. Seperti dimaklumi bahwa sistem nilai yang digunakan di kalangan pesantren adalah yang berakar dalam agama Islam. Namun demikian, tidak semua yang berakar dalam agama itu dipakai oleh mereka. Kalangan pesantren sendiri, menamakan sistem nilai yang dipakainya itu dengan ungkapan *ahlus sunnah wal jama'ah*.⁴⁸ Setiap pesantren sangat mungkin memiliki nilai dan tradisi uniknya sendiri, tetapi nilai-nilai keagamaan, pembelajaran al-Qur'an, dan kehidupan bersama adalah inti dari budaya pesantren di Indonesia. Tradisi-tradisi ini berperan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama santri.

Pesantren dengan corak tradisional, meskipun tidak setradisional dahulu, masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, dalam arti tidak mengalami transformasi yang berarti dalam sistem pendidikannya. Pesantren dengan corak ini hampir tidak terpengaruh oleh arus perubahan dan perkembangan zaman.⁴⁹

Pada dasarnya, pesantren dibangun atas keinginan bersama dua komunitas yang saling bertemu, yakni komunitas santri yang ingin menuntut ilmu sebagai bekal hidup dan kyai/guru yang secara ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuan. Relasi didaktik ini saling melengkapi. Kyai/guru dan santri adalah dua entitas yang memiliki kesadaran yang sama untuk membangun komunitas keagamaan yang disebut pesantren. Keinginan keagamaan pesantren ini dilandasi oleh keinginan untuk ber-*tafaqquh fi al-din*.⁵⁰ Dalam dunia pesantren, *tafaqquh fi al-din* ini hampir pasti berkaitan dengan kajian kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama' pada abad pertengahan, yakni antara abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 M. Kitab-kitab klasik tersebut lazim disebut kitab kuning.⁵¹

Dhofier mencatat bahwa kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan menjadi 8 kelompok, yakni: ilmu nahwu dan sharaf, ushul fiqh, fiqh, hadits, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, serta cabang-cabang lain seperti *tarikh* dan *balaghah*.

Kitab-kitab tersebut mencakup teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid kitab, baik mengenai hadits, tafsir, ushul fiqh, fiqh, maupun

⁴⁸ Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁴⁹ Neliwati, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁵⁰ Imam Thokliah dan Ahmad Barizi, *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

⁵¹ Neliwati, *Op. Cit.*, hlm. 31.

tasawuf. Kitab-kitab tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yakni kitab-kitab dasar, kitab-kitab menengah, dan kitab-kitab tingkat tinggi.

Dhofier juga menyimpulkan bahwa kitab-kitab yang diajarkan di seluruh pesantren di Indonesia hampir sama. Begitu juga dengan sistem pengajaran, umumnya menggunakan dua sistem, yakni *sorogan* dan *bandongan*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren yang dinilai sangat tradisional dan statis oleh sebagian ahli ini ternyata tidak sekedar membicarakan bentuk (*form*) dengan melupakan isi (*content*) ajaran yang tertuang dalam kitab-kitab tersebut. Para kyai sebagai pembaca sekaligus penerjemah kitab tersebut, tidak sekedar membaca teks, melainkan juga memberikan pandangan-pandangan pribadi (interpretasi), baik menyangkut isi maupun bahasa yang digunakan pada teks kitab itu. Dengan kata lain, para kyai juga memberikan komentar atas teks sebagai pandangan pribadinya.⁵²

Namun lepas dari penilaian ideal Dhofier di atas, yang sangat memprihatinkan adalah fakta melemahnya tradisi pembelajaran kitab kuning di beberapa pesantren. Setidaknya inilah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta bertajuk “Kontekstualisasi Kajian Kitab Kuning di Pesantren.”⁵³

Oleh karenanya, kini dan nanti, para kyai dan ustadz/guru di pesantren harus menguasai dengan baik nilai-nilai utama yang dipandang paling tradisional dari sebuah pesantren ini. Kecakapan-kecakapan yang mesti dimiliki mencakup bahasa Arab dengan seluruh bidangnya, termasuk juga cabang-cabang ilmu keislaman lainnya. Tanpa itu pesantren akan kehilangan relevansi dan ruhnya.

Nilai-nilai tradisional lainnya yang harus terus dipelihara di pesantren adalah musyawarah dan *bahtsul masail*. Dalam lingkungan pesantren, musyawarah bisa saja memiliki makna yang berbeda dengan penggunaan sehari-hari. Musyawarah bisa digunakan untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan teknis-praktis yang dihadapi santri, di kala lain digunakan juga untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi, baik oleh masyarakat pesantren maupun masyarakat umum. Dari sini musyawarah dan *bahtsul masail* sangat identik.

Berbeda dengan tradisi pembelajaran kitab kuning, musyawarah dan terutama *bahtsul masail* ternyata tidak tumbuh dengan baik di pesantren Indonesia. Pesantren

⁵²Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 87-88.

⁵³ Selengkapnya rujuk Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta, *Kontekstualisasi Kajian Kitab Kuning di Pesantren*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2015).

yang memiliki tradisi ini bisa dihitung dengan jari. Dalam banyak kasus, tidak tumbuhnya tradisi musyawarah dan *bahtsul masail* ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya tradisi pembelajaran kitab kuning di suatu pesantren. Karenanya, dua nilai tradisional pesantren ini adalah utasan mata rantai yang tak terpisahkan. Bila tradisi musyawarah dan *bahtsul masail* hendak digalakkan, maka sistem pembelajaran kitab-kitab kuning harus dibereskan terlebih dahulu. Tidak ada pesantren yang memiliki tradisi musyawarah dan *bahtsul masail* yang kuat tanpa terlebih dahulu membenahi tradisi pembelajaran kitab-kitab kuningnya.

Kemandirian Ekonomi Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045

Seperti telah diuraikan di atas, pesantren di Indonesia telah melewati waktu yang cukup panjang. Bila diukur dari peletakan dasar-dasarnya oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada kurun waktu 1399 M., maka itu artinya lembaga pendidikan tradisional Islam ini telah berusia 6 abad lebih, jauh lebih senior dari negara Indonesia yang baru menapaki usia 78 tahun pada 2023 ini. Sebagai lembaga yang berwatak *indigenous* (pribumi), pesantren merupakan basis peletakan berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia hingga kini.

Patut digarisbawahi apa yang disampaikan Nurcholis Madjid tentang kekhasan lembaga tradisional ini. Ia mengandaikan sekiranya negeri *gemah ripah loh jinawi* ini tidak mengalami penjajahan, maka sangat mungkin pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren pada umumnya. Perguruan tinggi barang kali tidak akan berupa ITB, UI, UGM, IPB, UNAIR, dan seterusnya, melainkan sangat mungkin bernama Universitas Lasem, Tremas, Tebuireng, Krapyak, Bangkalan, dan sebagainya. Tesis ini muncul setelah melihat dan membuat kias secara kasar terhadap pertumbuhan sistem pendidikan yang berkembang di negara-negara Barat, yang mana perguruan-perguruan tinggi terkenal di sana cikal bakalnya dapat dilacak pada perguruan-perguruan keagamaan.

Begitu juga, seandainya negeri ini tidak pernah dijajah oleh bangsa luar, pesantren-pesantren tidak akan terperosok terlalu jauh ke dalam daerah pedesaan yang terpencil seperti saat ini, melainkan akan berada di kota-kota pusat kekuasaan atau perekonomian, atau sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana halnya dengan sekolah-sekolah keagamaan yang ada di Barat yang

kemudian hari tumbuh menjadi universitas-universitas bergengsi bertaraf internasional.

Terlepas dari fakta itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan membentuk santri menjadi mandiri dalam semua dimensi dan sekaligus memupuk akhlak mulia.⁵⁴ Secara teoritis, bentuk-bentuk kemandirian mencakup kemandirian emosi, kemandirian intelektual, kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi sendiri mengarah pada kemampuan seseorang dalam bertindak dan mengatur ekonominya sendiri serta pemenuhan kebutuhan ekonomi itu sendiri yang tidak bergantung pada orang lain.⁵⁵ Kemandirian di sini bukanlah semata kemampuan dalam mengurus persoalan-persoalan internal pesantren, namun juga kesanggupan membentuk kondisi pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang merdeka, dalam arti tidak menggantungkan diri sepenuhnya pada bantuan dan pamrih pihak lain. Oleh karenanya, pesantren mesti dibangun di atas pondasi kekuatan sendiri sehingga ia menjadi merdeka, otonom, dan mandiri.⁵⁶ Umumnya, ukuran kemandirian pesantren dapat dilihat dari besar kecilnya pemasukan dari unit-unit usaha/bisnis yang dikelola oleh pesantren itu sendiri. Pada titik ini, sumber-sumber pemasukan dari luar, semisal pemerintah dan masyarakat umum tidak dapat dipungkiri sangat membantu pesantren. Namun hal itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama dan satu-satunya pemasukan pesantren.⁵⁷

Sebagai wadah persemaian kemandirian dan akhlak mulia bagi segenap santrinya, pesantren dituntut untuk terus menerus melakukan penguatan pada sisi kemandirian ekonomi atau keuangannya dengan tanpa mengabaikan penguatan-penguatan pada kemandirian lainnya.

Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonominya, pesantren akan berhadapan dengan faktor-faktor internal dan eksternal, baik yang berkenaan dengan kiyai maupun para santrinya. Faktor internal merupakan sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang seperti motivasi dan kebutuhan seseorang. Sebab pada dasarnya manusia menginginkan otonomi (bisa mengatur diri sendiri). Melepaskan diri dari kendala, ingin meloloskan diri dari kungkungan dan ketergantungan kepada orang

⁵⁴ Laifa Annisa Hendarmin dan Alvin Noor Sahab (Editor), *Loc. Cit.*

⁵⁵ Muhamad Masrur dan Agus Arwani, "Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (03), hlm. 2757.

⁵⁶ Imam Thokliah dan Ahmad Barizi, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁵⁷ Achmad Safiudin R dan Supriyanto, "Membentuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Telaah Terhadap Peran Kiai dalam Pesantren al-Amien Prenduan, Madura)," dalam *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 300.

lain. Sedangkan faktor eksternal mencakup dua hal, yakni: *Pertama*, faktor kebudayaan. Kebudayaan masyarakat yang kompleks dan maju akan membentuk kemandirian yang lebih tinggi. *Kedua*, faktor pola asuh. Pola asuh yang bersifat demokratis, otoriter dan bebas akan mempengaruhi pada perkembangan kemandirian seseorang.⁵⁸

Sementara itu, bersamaan dengan dengan upaya pesantren memperkuat kemandirian ekonominya, sebetulnya pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara konstitusional melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dibebani kewajiban untuk memperhatikan pendanaan pesantren sebagai salah satu basis meneguhkan eksistensi lembaga pendidikan tradisional ini. Masyarakat tidak lagi menjadi tulang punggung utama dan satu-satunya bagi kelangsungan hidup pesantren. Dalam undang-undang pesantren tersebut ditegaskan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren memang berasal dari masyarakat umum. Namun di sisi lain, Pemerintah Pusat juga dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Pemerintah Daerah setempat juga diberi ruang (beban) untuk membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan/belanja daerah yang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali itu, sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain (misalnya hibah dari luar negeri) yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.⁵⁹

Di samping sumber-sumber pendanaan yang telah disebutkan di atas, pesantren juga perlu mengupayakan sumber-sumber pendanaan internal yang tidak terkait dengan pihak lain. Ini penting dilakukan agar pesantren memiliki kemandirian ekonomi yang absolut atau setidaknya mendekati absolut. Karena bagaimana pun juga dana-dana yang diterima dari pihak luar tidaklah steril dari maksud-maksud tertentu. Alih-alih mandiri secara ekonomi, pesantren sangat mungkin kehilangan marwahnya sebagai akibat dari dana-dana eksternal yang tidak di-*screening* dengan baik.

⁵⁸ Rizal Muttaqin, "Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume I, No. 2, Desember 2011, hlm. 69.

⁵⁹ Periksa substansi Pasal 48 ayat 1-5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Untuk itu, pesantren perlu memiliki unit bisnis sendiri, baik yang berskala mikro, kecil, menengah maupun skala besar. Di Indonesia terdapat sekian pesantren yang memiliki unit bisnis dengan aset mencapai miliaran rupiah. Sekedar menyebut contoh, ada Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, yang telah memiliki BMT dan minimarket, di Bandung ada Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey yang bergerak di bidang agrobisnis, dan produknya kini sudah masuk ke berbagai supermarket dan di Yogyakarta terdapat pesantren yang sudah mengelola tempat wisata.⁶⁰ Di Sumenep Jawa Timur ada Pondok Pesantren al-Amien yang memiliki banyak aset dan unit usaha yang sudah didirikan dan dikelola dengan baik oleh pihak pesantren, antara lain berupa: 1) Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang mengelola usaha dibawahnya seperti Unit wartel, toko bahan bangunan, Unit Home Industri, Unit Jasa Rental, Unit kesejahteraan Keluarga, unit percetakan, unit jasa transportasi, Badan Usaha Non Koperasi (BUNK) pondok pesantren; 2). Pengembangan usaha non koperasi yang terdiri dari unit pengelolaan rajungan, pabrik Es, SPBU (stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), Peternakan dan perkebunan, Unit perusahaan tahu-tempe, Perusahaan Air Minum Kemasan “Lana”; dan 3). Pelaksana Pemeliharaan dan Perluasan Tanah Wakaf (P3TW).⁶¹

Ditilik dari konteks keindonesiaan, penguatan kemandirian ekonomi/keuangan pesantren memiliki peran yang sangat signifikan guna membangun basis ekonomi nasional yang kokoh. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) prasyarat bagi kemajuan bisnis ekonomi dan keuangan pesantren dengan pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern. *Pertama*, keuletan dan daya tahan. *Kedua*, memperkuat jejaring/silaturahmi bisnis. *Ketiga*, memperkuat pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui ekosistem rantai nilai halal.⁶²

Berbeda dengan prasyarat tersebut, Achmad Safiudin R dan Supriyanto⁶³ mengidentifikasi empat persyaratan yang haruslah dipenuhi oleh pesantren untuk dapat melangkah sebagai pesantren yang berdaya secara ekonomi. Ia menitikberatkan pada program-program pembangunan yang harus terlaksana mencakup: *pertama*, acara atau kegiatan-kegiatan pesantren harus diselenggarakan secara terarah,

⁶⁰ <https://kemenag.go.id/opini/visi-kemandirian-pesantren-la881e>, diakses 9 September 2023.

⁶¹ Achmad Safiudin R dan Supriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 285-286.

⁶² https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_243822.aspx, diakses 9 September 2023.

⁶³ Achmad Safiudin R dan Supriyanto, “Membentuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Telaah terhadap Peran Kiai dalam Pesantren Al-Amien Prenduan, Madura)” dalam *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 297-298.

terencana dan terkendali agar menguntungkan pesantren dan masyarakat sekitar, terlebih lagi bagi masyarakat yang tergolong lemah (*dhaif*). *Kedua*, dalam implementasi kegiatan harus dilakukan sendiri oleh pesantren dan masyarakat. *Ketiga*, karena pesantren dan masyarakat yang umumnya lemah akan sangat sulit dalam bekerja sendiri-sendiri disebabkan oleh kurang berdayanya mereka. Oleh sebab itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi pesantren diperlukan peningkatan kegiatan usaha bersama (cooperatif) dalam suatu kelompok-kelompok yang khusus/spesifik yang berkaitan dengan unit-unit bisnis/usaha yang dapat diberdayakan oleh para santri. *Keempat*, memobilisasi peran serta masyarakat sekitar agar saling bahu-membahu membantu pesantren dalam rangka meningkatkan solidaritas sosial.

Di samping prasyarat-prasyarat tersebut, terdapat empat aspek yang mesti diperhatikan pesantren yang diidentifikasi dapat menghambat pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, yakni aspek pemasaran, jaringan, kapabilitas, dan permodalan. Aspek pemasaran berkenaan dengan terbatasnya akses pasar untuk menjual setiap hasil produksi pesantren. Aspek jaringan lebih banyak berhubungan dengan keterbatasan *networking*, baik itu dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand*. Aspek kapabilitas menyangkut keterbatasan kapabilitas guna meningkatkan kapasitas ekonomi. Sementara aspek permodalan berkaitan dengan keterbatasan permodalan sendiri dan sekaligus akses ke lembaga keuangan.⁶⁴

Pesantren sebetulnya memiliki tiga potensi ekonomi yang harus dikelola dengan baik agar bisa mandiri secara ekonomi. Ketiga potensi dimaksud adalah potensi santri, potensi masyarakat di sekitar pesantren, serta potensi zakat dan wakaf. Dengan potensi yang dimiliki ini, pesantren semestinya dapat menciptakan kemandirian ekonominya sendiri dan pada saat bersamaan dapat berperan ikut serta membangun perekonomian bangsa secara umum. Bila potensi ini bisa dioptimalkan dengan baik, maka akan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan di wilayah sekitar pesantren. Pesantren yang mandiri secara ekonomi setidaknya dapat diukur dari unit bisnis atau usaha yang dimiliki. Semakin banyak dan semakin menguntungkan unit bisnis yang dimiliki, maka kemandirian ekonomi pesantren juga semakin kuat. Keberadaan unit bisnis ini sendiri dimaksudkan untuk mendukung keseluruhan operasional pesantren. Dalam skala yang lebih luas, kemandirian ekonomi pesantren yang lahir dari

⁶⁴ Maya Silvana dan Deni Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 133.

keberadaan unit bisnis ini dapat menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran untuk menyejahterakan masyarakat luas.⁶⁵

Penguatan kemandirian ekonomi pesantren memiliki sejumlah manfaat, di antaranya, *Pertama*, keberlanjutan pendidikan. Pesantren merupakan lembaga tradisional yang berperan dalam mendidik generasi muda dalam hal agama dan moral. Dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, pesantren dapat menjaga keberlanjutan pendidikan mereka, termasuk pembayaran gaji guru dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. *Kedua*, peningkatan kualitas pendidikan. Dengan sumber daya yang lebih besar dari usaha ekonomi yang kuat, pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Ini bisa melibatkan penyediaan perpustakaan yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, atau pelatihan tambahan untuk guru. *Ketiga*, pemberdayaan santri. Melalui usaha ekonomi, pesantren dapat melibatkan santri dalam kegiatan kewirausahaan. Ini dapat membantu santri mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan manajemen yang dapat mereka gunakan setelah meninggalkan pesantren. *Keempat*, terkait dampak positif pada masyarakat lokal. Usaha ekonomi pesantren juga dapat memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Ini bisa melibatkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan daerah tersebut. *Kelima*, mengurangi ketergantungan pada donasi eksternal. Mengandalkan donasi eksternal atau pendanaan dari pihak ketiga dapat tidak stabil dan tidak dapat diandalkan selama-lamanya. Dengan menguatkan kemandirian ekonomi, pesantren dapat menjadi lebih independen secara finansial.

Penguatan kemandirian ekonomi pesantren melibatkan serangkaian langkah strategis yang harus dipertimbangkan dan diimplementasikan dengan cermat. Langkah-langkah strategis itu sendiri dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan sumber daya pesantren yang tersedia. Namun pada umumnya, langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan sebuah pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonominya adalah:

1. Penilaian potensi dan sumber daya. Pertama-tama, pesantren perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki. Ini termasuk mengevaluasi aset fisik (tanah, bangunan), keterampilan dan keahlian santri dan staf, serta peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar.

⁶⁵ Muhamad Masruru dan Agus Arwani, *Loc. Cit.*

2. Perencanaan strategis. Setelah menilai potensi dan sumber daya, pesantren harus merumuskan rencana strategis untuk mengembangkan usaha ekonomi. Rencana ini harus mencakup tujuan jangka pendek dan panjang, sumber daya yang dibutuhkan, dan tindakan yang harus diambil.
3. Diversifikasi pendapatan. Pesantren harus berupaya untuk tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Oleh karenanya, pesantren perlu melakukan diversifikasi pendapatan dengan menjalankan beberapa usaha ekonomi yang berbeda, seperti pertanian, kerajinan, atau pendidikan non-formal.
4. Pendidikan kewirausahaan yang berkesinambungan. Pesantren harus membuat perencanaan menyeluruh mengenai pendidikan kewirausahaan yang berkesinambungan kepada santri dan staf pesantren. Ini dapat membantu mereka mengelola usaha ekonomi dengan lebih efisien dan inovatif.
5. Pengelolaan keuangan yang bijaksana. Pesantren harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik. Ini mencakup pemantauan pendapatan dan pengeluaran secara rutin, penyusunan anggaran, dan pengendalian biaya.
6. Kemitraan dan jaringan. Pesantren harus berupaya membangun kemitraan dengan pihak ketiga, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau pelaku usaha lokal. Kemitraan ini dapat membantu dalam pengembangan usaha ekonomi pesantren. Kemitraan ini dapat berupa bantuan pendanaan, pelatihan, atau dukungan lainnya.
7. Pemasaran dan promosi. Penting untuk memasarkan produk atau layanan yang dihasilkan oleh pesantren dengan baik. Ini dapat melibatkan pembuatan strategi pemasaran, peningkatan citra merek, dan penggunaan media sosial dan situs web untuk promosi.
8. Evaluasi dan penyesuaian. Pesantren harus terus memantau kinerja usaha ekonomi yang dimilikinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Jika ada masalah atau peluang baru, pesantren harus siap untuk melakukan penyesuaian dalam rencana strategis mereka.
9. Keterbukaan/transparansi. Hal lain yang tidak dapat disepelekan adalah berkenaan dengan keterbukaan atau transparansi. Dalam konteks ini, pesantren harus dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk santri, staf, dan donatur, memahami bagaimana dana dan pendapatan digunakan. Keterbukaan dan transparansi akan membantu membangun kepercayaan.

10. Manajemen risiko. Pada tahap akhir, yang tidak boleh dilupakan pesantren adalah mengelola risiko yang mungkin timbul. Pesantren harus proaktif mengidentifikasi potensi risiko dalam usaha ekonomi dan sekaligus menyiapkan rencana untuk mengelolanya. Kegiatan ini melibatkan manajemen risiko finansial, operasional, dan hukum.

KESIMPULAN

Dewasa ini, pesantren dituntut untuk terus menerus melakukan penguatan pada sisi kemandirian ekonominya dengan tanpa mengabaikan penguatan-penguatan pada kemandirian lainnya. Kemandirian ekonomi ini dapat diukur dari besar kecilnya pemasukan yang diperoleh dari unit-unit usaha atau bisnis yang dikelola oleh pesantren itu sendiri.

Pesantren perlu mengupayakan sumber-sumber pendanaan internal yang tidak terkait dengan pihak lain. Ini penting dilakukan agar pesantren memiliki kemandirian ekonomi yang absolut atau setidaknya mendekati absolut. Karena bagaimana pun juga dana-dana yang diterima dari pihak luar tidaklah steril dari maksud-maksud tertentu. Alih-alih mandiri secara ekonomi, pesantren sangat mungkin kehilangan marwahnya sebagai akibat dari dana-dana eksternal yang tidak di-*screening* dengan baik.

Penguatan kemandirian ekonomi pesantren memiliki peran yang sangat signifikan guna membangun basis ekonomi nasional yang kokoh. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) prasyarat bagi kemajuan bisnis ekonomi dan keuangan pesantren dengan pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern. *Pertama*, keuletan dan daya tahan. *Kedua*, memperkuat jejaring/silaturahmi bisnis. *Ketiga*, memperkuat pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui ekosistem rantai nilai halal.

Di samping prasyarat-prasyarat tersebut, terdapat empat aspek yang mesti diperhatikan pesantren yang diidentifikasi dapat menghambat pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, yakni aspek pemasaran, jaringan, kapabilitas, dan permodalan. Aspek pemasaran berkenaan dengan terbatasnya akses pasar untuk menjual setiap hasil produksi pesantren. Aspek jaringan lebih banyak berhubungan dengan keterbatasan *networking*, baik itu dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand*. Aspek kapabilitas menyangkut keterbatasan kapabilitas guna meningkatkan kapasitas

ekonomi. Sementara aspek permodalan berkaitan dengan keterbatasan permodalan sendiri dan sekaligus akses ke lembaga keuangan.

Penguatan kemandirian ekonomi pesantren memiliki sejumlah manfaat, di antaranya, *Pertama*, keberlanjutan pendidikan. Pesantren merupakan lembaga tradisional yang berperan dalam mendidik generasi muda dalam hal agama dan moral. Dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, pesantren dapat menjaga keberlanjutan pendidikan mereka, termasuk pembayaran gaji guru dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. *Kedua*, peningkatan kualitas pendidikan. Dengan sumber daya yang lebih besar dari usaha ekonomi yang kuat, pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Ini bisa melibatkan penyediaan perpustakaan yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, atau pelatihan tambahan untuk guru. *Ketiga*, pemberdayaan santri. Melalui usaha ekonomi, pesantren dapat melibatkan santri dalam kegiatan kewirausahaan. Ini dapat membantu santri mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan manajemen yang dapat mereka gunakan setelah meninggalkan pesantren. *Keempat*, terkait dampak positif pada masyarakat lokal. Usaha ekonomi pesantren juga dapat memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Ini bisa melibatkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan daerah tersebut. *Kelima*, mengurangi ketergantungan pada donasi eksternal. Mengandalkan donasi eksternal atau pendanaan dari pihak ketiga dapat tidak stabil dan tidak dapat diandalkan selama-lamanya. Dengan menguatkan kemandirian ekonomi, pesantren dapat menjadi lebih independen secara finansial.

Langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan sebuah pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonominya mulai dari penilaian potensi dan sumber daya yang dimiliki; perancangan strategis; diversifikasi pendapatan yang berarti pula diversifikasi unit usaha atau bisnis; pendidikan kewirausahaan yang berkesinambungan; pengelolaan keuangan yang bijaksana; penguatan kemitraan dan jaringan, terutama dengan pihak eksternal; ekspansi pemasaran dan promosi; transparansi dalam semua hal; hingga manajemen risiko yang terkendali dan terukur, baik menyangkut risiko finansial, operasional, hukum maupun risiko lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan & Idris Hemay (Editor). 2022. *Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme (Social Bonding, Social Bridging, Social Linking)*. Jakarta: CSRC UIN.
- Alam, Masnur. 2010. *Model Pesantren sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press.
- Al Asyari, Abul Hasan. 2022. "Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren di Era Modern." *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, Volume 2, Number 1, Januari 2022.
- Anwar, Ali. 2011. *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: IAIT Press & Pustaka Pelajar.
- Aziz, Dede Jamalul. 2019. "Modernisasi dan Transformasi Pondok Pesantren." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 2, November 2019.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Burhanudin, Jajat dkk. 2009. *Civic Values di Indonesia; Pengalaman Pemberdayaan Pesantren*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Fatmawati, Erma. 2015. *Profil Pesantren Mahasiswa*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Hamid, Abdulloh. 2017. *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren*. Surabaya, IMTIYAZ
- Hamka. 2017. *Dari Perbendaharaan Lama Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara*. Jakarta: Gema Insani.
- Hendarmin, Laifa Annisa dan Alvin Noor Sahab (Editor). 2022. *Pesantren & Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentanan*. Jakarta: PPIM-UIN Jakarta.
- Humaidi, Anis. 2019. "Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 2, November 2019.
- Japar, Muhammad. 2018. *Teknologi dan Informasi Pendidikan*. Jakarta Timur, Laboratorium Sosial Politik Press.
- Latif, Yudi. 2021. *Inteligensia Muslim dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Jakarta: Kencana.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat.
- Malik, Amit Saepul. 2022. *Kiprah Intelektual Pesantren*. Purwakarta: Taqaddum Press.
- Maragustam (Ed.). 2014. *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhtifah, Lailial, Zaenuddin, dan Nurhamzah. 2015. *Model Pemberdayaan Mutu Pondok Pesantren Sebagai Pusat Studi Masyarakat*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Munifah, "Antara Tradisi dan Modernitas: Metamorfosis Pesantren di Era Digital." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 2, November 2019.
- Mustajab. 2015. *Masa Depan Pesantren Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LkiS.
- Muthohar, Ahmad. 2007. *Ideologi Pendidikan Pesantren; Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Neliwati. 2019. *Pondok Pesantren Modern Sistem Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Ridley, Matt. 2020. *Optimis Rasional*, Terj. Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Safiudin R, Achmad. 2021. "Membentuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Telaah Terhadap Peran Kiai dalam Pesantren al-Amien Prenduan, Madura)." *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2021.

- Said, Asnah. 2020. *Profil Guru Masa Depan Berbasis Teknologi Pendidikan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Sirin, Khaeron (Eds.). 2021. *Transformasi Pesantren Salafi*. Jakarta Pusat: Litbangdiklat Press.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2018. *Api Sejarah Jilid Kesatu*. Bandung: Surya Dinasti.
- Thoklhah, Imam dan Ahmad Barizi. 2004. *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta. 2015. *Kontekstualisasi Kajian Kitab Kuning di Pesantren*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Tim Penyusun Visi Indonesia 2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2019. *Background Study Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Wijaya, Aksin. 2020. *Satu Islam Ragam Epistemologi*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Website dan Peraturan Perundang-Undangan:

- https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_pendidikan.
- <https://kemenag.go.id/opini/visi-kemandirian-pesantren-1a881e>.
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_243822.aspx.
- <https://www.nu.or.id/nasional/bagaimana-santri-ideal-menurut-gus-mus-REtNr>.
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/selain-al-zaytun-berapa-jumlah-pesantren-di-indonesia>.
- <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/pesantren--dulu--kini--dan-mendatang>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly.